

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif Teori Planned Behavior . *Jurnal Pajak Indonesia*, 20-29.
- Aida, N. R. (2020, November 5). Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/05/125200565/indonesia-resmi-resesi-ini-yang-perlu-kita-tahu-soal-resesi-dan-dampaknya?page=all>
- Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. *Milton Keynes: Open University Press dan Chicago*.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179-211.
- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Alimuddin, Syarifuddin, Amiruddin, & Ashari, M. (2021). Peningkatan Kapabilitas Bendahara Penerimaan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 373-378.
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 22.
- Diana, S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Faria, A. G., & Yocelik, Z. (1995). *The Interrelationship Between Tax Policy and Tax Administration*. Washington DC: Tax Policy Division Fiscal Affairs Department International Monetaz Fund.
- Handayani, N., & Zahro, M. (2021). Potret Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Wahana Riset Akuntansi*, 62-79.
- Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 1-7.
- Indira, M., Saerang, P.E., D., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 938-949.
- Inge, N. (2021, November 24). *Masih Ada 5 Kabupaten di Sumsel yang Berstatus PPKM Level 3*. Diambil kembali dari Liputan6:

<https://www.liputan6.com/regional/read/4718979/masih-ada-5-kabupaten-di-sumsel-yang-berstatus-ppkm-level-3>

- Irawati. (2011). Kebijakan Pembayaran Dalam Perpajakan. *Jurnal Kybernan Vol. 2*, 60-67.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khuzaimah, M. F., Afifah, N., & Ka, V. S. (2021). Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 107.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology* 29, 210-225.
- Kurniawati, & Eli, S. (2018). Analisis Penerapan Withholding Tax System Perspektif Mutatis Mutandis Pada Lembaga Keuangan Syariah . *Jurnal Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Mahadi, T. (2021). *Realisasi Pajak 2019 Jeblok, Tahun Ini Diramal Tak Akan Jauh Berbeda*. Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-pajak-2019-jeblok-tahun-ini-diramal-tak-akan-jauh-berbeda>
- Mapanawang, M. A., Sondakh, J., & Pusung, R. (2018). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN Di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 30-37.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi* . Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Publisher.
- Mufarokhah, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan PPN dan PPh pasal 22 Atas pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* , 67-75.
- Muslih, Rahmawara, E., & Nurhendratno, S. S. (2015). Desain Pola Struktur Mapping Schema Untuk Sinkronisasi dan Integrasi Multidatabase Terdistribusi Dalam Mengelola Data Epidemiologi. *Jurnal Techno.Com Vol.14*, 62-71.
- Nasution, N. A., & Fitriani, A. (2019). Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Bina Pratama Rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 2685-5674.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- Purwanto, A., Asbari, M., & Santono, P. B. (2019). Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kepemimpinan, Komitmen dan Budaya Kerja Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001, ISO 14000 dan ISO 45001 Pada Industri Otomotif. *Jurnal Produktivitas* 6, 158-166.
- Rachmayanti, R. (2008). Mengkritisi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Konsepsi Withholding Income Tax dan International Best Practice. Universitas Indonesia.
- Rakhmat, M., & Wahid, A. A. (2016). Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 21-26.

- Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2013). Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 1-15.
- R, M. (1992). *The Indonesia Income Tax, A Case Study in Tax Reform*. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
- Sebayang, R. (2020). *WHO Nyatakan Wabah Covid-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya?* Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>
- Seni, N. N., & Ratnadi, N. M. (2017). Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4043-4068.
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas Tuntas PPh Potput (Edisi 2)*. Salemba Empat.
- Soemarso, S. (2007). *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sorongan, C. T. (2014). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 705.
- Sulfan. (2019). Withholding Tax atas Bunga Dalam Transaksi Financial Technology Lending. *Indonesian Tax Journal*, 16-24.
- Taroreh, L. A., morasa, J., & Mawikere, L. M. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUD Prof DR. R. D. Kandou Manado. *Jurnal EMBA*, 378-386.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2337-3806.
- Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 916-923.

Vaughan, G., & Hogg, M. (2005). *Introduction to social psychology*. Australia: Pearson Prentice Hall.

Yusran, R. R. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemotongan PPh pasal 23. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 127-133.

Zain, M. (2004). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba E